PERLINDUNGAN HAK MEMBENTUK IKATAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

Hendrik Nathanael SayaMagister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana | devianets@gmail.com**Abstrak**

Tulisan ini adalah miniatur dari skripsi penulis yang berisi tentang perlindungan terhadap hak membentuk ikatan perkawinan pekerja, dimana hak membentuk ikatan perkawinan bisa dibatasi oleh perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama hal tersebut diatur dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap hak membentuk ikatan perkawinan pekerja dimaksud dengan pertimbangan, hak asasi manusia dimana ikatan perkawinan adalah hak yang melekat pada setiap manusia sehingga tidak dapat dibatasi oleh undang-undang. Pasal 153 ayat (1) huruf f sangat jelas bertentangan dengan HAM, dalam Pasal 153 huruf f memberi ruang kepada pengusaha untuk dapat membatasi ikatan perkawinan pekerja.

Abstract

This paper is a miniature of the author's thesis urging the protection of the employee's right to marry. Article 153 paragraph (1) letter (F) Law Number 13 of 2003 concerning Manpower allows the limitation of the right to marry by work agreements, company regulations, or joint labour agreements. However, the right to marry between employees shall not be limited because it is an inherent human right. Consequently, the right cannot be limited by law. This paper will argue that Article 153 paragraph (1) letter (F) of the law is not consistent with human rights law.

Kata-kata kunci:
Perlindungan;
Ikatan Perkawinan;
HAM.

Keywords:
Protection;
Marriage Association;
Human Rights.

PENDAHULUAN

Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang terkemuka, pernah berkata bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, yaitu selalu mencari manusia lain untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi.¹ Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Dalam hal ini pikiran orang tidaklah mesti atau selalu ditujukan pada hal bersetubuh antara dua orang tadi. Pada umumnya dapat dikatakan, hal tersebut merupakan faktor pendorong yang penting untuk hidup bersama, baik dengan keinginan mendapatkan anak turunannya sendiri, maupun hanya untuk memenuhi hawa nafsu belaka.²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut maka dapat diketahui poin-poin penting dalam perkawinan bahwa; *Pertama*, perkawinan adalah suatu ikatan yang dibuat antara laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang bersepakat membentuk suatu keluarga. *Kedua*, rasa suka sama suka adalah suatu sifat yang melekat pada setiap manusia dimana rasa tersebut timbul karena ketertarikan kepada manusia lain. Rasa suka manusia terhadap manusia lain tidak dapat diperkirakan karena hal tersebut terjadi begitu saja. *Ketiga*, subyeknya yaitu setiap orang (*natuurlijke person*) yang berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan poin-poin di atas maka kita dapat mengetahui maksud dari pengertian perkawinan.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Merujuk pada Pasal tersebut, maka menunjukkan Negara Republik Indonesia sangat menjunjung sekali hukum sebagai dasar dari konstitusi. Menurut J.G. Steenbeek, konstitusi sebagai aturan dasar tertinggi dalam suatu negara minimal menunjukkan tiga hal pokok yaitu: (1) adanya jaminan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan warga negara; (2) ditetapkannya susunan kenegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan (3) adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.³ Bertumpu pada pengertian tersebut maka perlindungan hak asasi manusia adalah isu yang sangat sensitif.

Selanjutnya ikatan perkawinan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur secara khusus dalam Bab X UUD NRI 1945 Pasal 28B ayat (1) menyatakan 'setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah'. Hak perkawinan juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) yang menyatakan 'setiap orang berhak membentuk

¹ Rasjidi Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Remaja Rosdakarya 1990) 1.

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (cet. 9, Sumur 1984) 7.

³ Arie Purnomosidi, 'Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Distabilitas di Indonesia' (2017) 1 (2) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 161, 162.

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah' lebih lanjut ayat (2) mengatakan 'perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang'. Pasal-pasal tersebut adalah manifestasi dari kebebasan setiap orang dalam memilih pasangan dan membentuk keluarga dengan siapapun dan dimanapun tanpa batas.

Namun dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dikatakan bahwa ikatan perkawinan dapat dilarang apabila telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Mengacu pada ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa tidak ada perlindungan dan jaminan terhadap hak membentuk ikatan perkawinan dalam UU Ketenagakerjaan. Konsekuensi lebih lanjut, diterapkannya ketentuan pada Pasal 153 ayat (1) huruf f, perusahaan dengan bebas melarang para pekerja untuk tidak membuat ikatan perkawinan dengan teman sekantor. Jika hal tersebut terjadi maka konsekuensi yang akan ditanggung oleh pekerja yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berdasarkan isu tersebut, seharusnya UU Ketenagakerjaan dapat melindungi hak membentuk ikatan perkawinan karena ikatan perkawinan adalah hak yang melekat pada setiap manusia.

Berpijak pada uraian di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah apakah ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan melanggar HAM? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut maka, penelitian ini akan memfokuskan pada perlindungan terhadap ikatan perkawinan pekerja dimana ikatan perkawinan adalah kehendak bebas dari setiap manusia. Untuk memperjelas pendapat penulis, maka penulis akan membahas *pertama*, dasar hukum perlindungan ikatan perkawinan. *Kedua*, pelanggaran HAM. *Ketiga*, hak pekerja. *Keempat*, pemutusan hubungan kerja. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu apakah ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan melanggar HAM atau tidak.

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) yang ditujukan pada konsep perlindungan hak membentuk ikatan perkawinan di dalam UU Ketenagakerjaan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁵ dan pendekatan kasus (*case approach*)⁶. Pendekatan perundangan, bahan hukum yang digunakan meliputi perjanjian internasional dan dokumen hukum nasional. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kedua pendekatan ini penulis gunakan untuk menjelaskan bahwa pentingnya HAM dalam suatu undang-undang.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana 2005) 95.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)* (cet. 12, Prenadamedia Group 2005) 136.

⁶ *Ibid.*, 158.

PEMBAHASAN

Pengertian perkawinan

Masyarakat terdiri dari manusia, baik perorangan (individu) atau kelompok-kelompok manusia yang telah berhimpunan untuk berbagai keperluan atau tujuan. Pergaulan atau hubungan masyarakat adalah interaksi antara manusia dan kelompok manusia yang saling berhubungan dan tergantung. Agar hubungan ini berjalan dengan baik dibutuhkan aturan berdasarkan mana orang melindungi kepentingannya dan menghormati kepentingan dan hak orang lain sesuai hak dan kewajiban yang ditentukan aturan (hukum) itu.⁷ Pergaulan atau hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan perasaan rasa suka sama suka sehingga keduanya bersepakat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius atau pernikahan.

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing dan harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ikatan diartikan adalah penyatuan dari dua pasangan, yaitu pria dan wanita. Penyatuan itu melalui penyatuan lahir dan batin. Setelah perkawinan, maka suami menjadi kepala keluarga, sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga.⁸ Dari kutipan di atas bila dicermati maka tahap pertama, dari suatu perkawinan yaitu, atas dasar suka sama suka dimana dari tahap ini laki-laki dan perempuan tidak bisa mengetahui dimana mereka akan bertemu (tempat, waktu), berlanjut lagi ke tahap selanjutnya yaitu, kedua belah pihak bersepakat untuk membentuk ikatan perkawinan.

Berpegang pada rumusan Pasal 1, yaitu pada kalimat kedua yang berbunyi: *'dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang maha esa'*. Maka penulis berpendapat bahwa, tujuan perkawinan tidak hanya memenuhi kepuasan batin semata, melainkan di dalamnya terdapat makna yang sangat mendalam yaitu bagian dari ibadah kepada sang Pencipta. Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam UU Perkawinan sangat ideal.

Ada pun pendapat dari sudut pandang agama yang merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut:

a. Kristen Protestan

Pandangan Agama Protestan mengenai perkawinan dimulai dengan melihat perkawinan sebagai suatu peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Mereka memandang pernikahan sebagai tata-tertib suci yang ditetapkan Tuhan.⁹

Firman Tuhan :

“Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi nya yang sepadan dengan dia”. (Kejadian 2:18). “...dibangunNya-lah seorang perempuan, lalu dibawaNya kepada manusia itu”. (Kejadian 2:22). “Lalu berkata manusia itu:

⁷ Herman M. Karim, 'Keabsaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila' (2017) 8 (2) ADIL jurnal hukum 187, 192.

⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (cet. 2, Rajawali Pers 2006) 10.

⁹ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang perkawinan No. 1/1974* (Dian Rakyat 1986) 38.

inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku...” (Kejadian 2:23). “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging” (Kejadian 2:24).”

b. Katolik

Agama Katolik menganggap pernikahan sebagai suatu sakramen. Gereja Roma Katolik mendasarkan ajarannya itu pada Efesus 5:25-33. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Paulus mengumpamakan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita itu sebagai hubungan antara Kristus dan jemaatnya.¹⁰ Dari pandangan tersebut di atas, maka wajarlah gereja Katolik merumuskan perkawinan sebagai “ikatan cinta mesra dan hidup bersama yang diadakan oleh sang pencipta dan dilindungi oleh hukum-hukumNya.

c. Islam

Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Banyak sarjana Islam telah mencoba memberikan rumusan tentang arti perkawinan, diantaranya adalah:¹¹

- 1) Prof. Dr. H. Muhamad Yunus “*perkawinan ialah aqad antara calon laki-istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’at*”
- 2) Sayuti Thalib, SH “*pengertian perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan*”.
- 3) M. Idris Ramulyo, SH “*perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasahi, aman tenteram bahagia dan kekal*”.

d. Hindu

Agama Hindu memandang perkawinan sebagai sesuatu yang suci. Perkawinan adalah samskara (sakramen) dan termasuk salah satu dari sekian banyak sakramen sejak proses kelahiran (gharbadana) sampai proses upacara kematian (Antysti). Pengertian perkawinan menurut hukum Hindu adalah, ikatan suci antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang utama, yaitu keturunan, “purusa”.¹²

e. Budha

Pengertian perkawinan menurut agama Budha adalah sebagai suatu ikatan suci yang harus dijalani dengan cinta dan kasih sayang seperti yang diajarkan oleh Budha. Atau dapat pula dikatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin dari dua orang yang berbeda kelamin, yang hidup bersama untuk selamanya dan bersama-sama melaksanakan Dharma Vinaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan sekarang ini dan kehidupan yang akan datang”. Tujuan perkawinan menurut ajaran agama Budha adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik dalam kehidupan sekarang ini dan kehidupan yang akan datang.¹³

¹⁰ *Ibid.*, 34.

¹¹ *Ibid.*, 27.

¹² *Ibid.*, 45.

¹³ *Ibid.*, 51.

Berpedoman pada pengertian perkawinan menurut lima agama di atas, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan pada dasarnya mempunyai makna sakral, suci dan bertujuan untuk menggapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berkeluarga.

Tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja tapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga perkawinan itu hendaklah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja.¹⁴

Senada dengan hal itu, menurut Amin, dalam bukunya *Status Perkawinan Antar Agama: Ditinjau Dari UU Perkawinan*, dikatakan bahwa rumusan tersebut mengandung harapan, bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materil maupun spiritual. Selanjutnya dikatakan bahwa kebahagiaan yang dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, karenanya perkawinan yang diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal, yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut.

Dari pengertian dan tujuan perkawinan yang telah penulis kemukakan di atas maka tidak dapat dibenarkan jikalau ada aturan hukum yang hendak mengatur tentang larangan menikah sebab kalau itu terjadi maka sama saja membatasi hak untuk kebahagiaan. Selain itu dengan melarang orang menikah sama saja melarang orang untuk beribadah kepada sang pencipta. Dari dua pendapat di atas, apabila dikaitkan dengan Pasal 153 ayat 1 huruf f yang mana Pasal tersebut memberikan hak kepada pengusaha untuk mengatur dan tidak mengatur larangan untuk menikah melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, peraturan kerja bersama, maka dapat penulis simpulkan bahwa Pasal tersebut tidak pro terhadap hukum atau bisa dikatakan tidak mencerminkan suatu keadilan.

Berikut syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat yang lebih dititikberatkan pada orangnya diatur di dalam UU sebagai berikut:¹⁵

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;

¹⁴ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bina Aksara 1987) 4.

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Rineka Cipta 1991) 40.

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini;
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan Pasal 7 UU Perkawinan disebutkan bahwa:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan Pasal tersebut maka jika syarat-syarat yang tertuang di dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perkawinan telah terpenuhi, maka laki-laki dan perempuan yang sudah mempunyai perasaan suka sama suka dapat melangsungkan ikatan perkawinan. Namun di samping itu adapun UU Perkawinan juga mengatur adanya larangan perkawinan yang menyangkut beberapa masalah, yaitu:¹⁶

- a) Larangan perkawinan yang disebabkan karena keadaan tertentu dari kedua calon baik suami dan atau isteri yang terdapat di dalam Pasal 8 yang ditegaskan bahwa: perkawinan dilarang antara dua orang yang:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- b) Pasal 9 mengatur tentang adanya larangan kawin bagi seorang perempuan yang masih bersuami atau sebaliknya, yaitu 'seorang yang masih terikat tali

¹⁶ *Ibid.*, 46.

perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU ini.

Dari muatan Pasal 8 dan pasal 9 UU perkawinan, kita bisa melihat bahwa yang dapat dilarang dalam perkawinan ialah, sesama keluarga sedarah, sepupuan, menantu dengan mertua, ponakan dan paman atau bibi, perempuan yang dalam masa ida. Dalam hal Pasal tersebut, jika dicermati tidak memuat pasal atau ayat baik secara eksplisit maupun implisit tentang larangan menikah dengan teman sekantor. Hal ini karena Pasal tersebut tidak termasuk ke dalam kategori sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU Perkawinan. Artinya, apabila dikaitkan dengan Pasal 153 ayat 1 huruf f maka seharusnya Pasal tersebut memuat hal yang sama seperti yang tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU Perkawinan, jikalau membuat suatu larangan menikah, bukan membatasi hak orang untuk membuat ikatan perkawinan. Hal tersebut justru bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, dimana ikatan perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat dilindungi dalam UUD 1945 pada Bab X.

Dasar Hukum Perlindungan Membentuk Ikatan Perkawinan

Berikut adalah aturan-aturan yang mengatur tentang dasar hukum perkawinan yang termuat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), UUD NRI 1945, UU HAM. Ikatan perkawinan adalah bagian dari HAM, dimana ikatan perkawinan menjadi kebutuhan dasar setiap orang, agar tercapainya hidup yang bahagia. Lebih lanjut penulis hendak memaparkan dasar hukum yang mendasari ikatan perkawinan. Pasal 16 ayat (1) DUHAM mengatakan:

- 1) *Orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan, dengan tidak dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk mencari jodoh dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, dan di kala perceraian.*
- 2) *Perkawinan harus dilaksanakan hanya dengan cara suka sama suka dari kedua mempelai.*
- 3) *Keluarga adalah kesatuan yang sewajarnya serta bersifat pokok dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.*

Muatan Pasal 16 ayat 1 DUHAM jelas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa tanpa membedakan ras, suku, bangsa, dan agama berhak untuk membentuk suatu ikatan perkawinan. Dalam hal ini artinya DUHAM mengakui serta sangat menghormati ikatan perkawinan adalah hal mendasar dari setiap manusia, sehingga harus dilindungi.

Selanjutnya DUHAM menegaskan bahwa dasar dari suatu ikatan perkawinan ialah rasa suka sama suka dari kedua mempelai yang artinya bahwa seseorang di berikan kebebasan dalam memilih jodohnya tanpa melihat tempat maupun waktu, selama rasa suka sama suka itu ada dari kedua belah pihak maka dapat melangkah ketahap selanjutnya yaitu membentuk ikatan perkawinan. Yang terakhir DUHAM menegaskan bahwa keluarga adalah bagian kecil dari suatu masyarakat sehingga harus dilindungi. Selain sudah dijamin dalam Pasal 16 DUHAM dan (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Kovensi Eropa, dan Konvensi Amerika). Pasal 28 B ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan 'setiap orang berhak

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah'. Dari muatan Pasal 28B tersebut, ditegaskan bahwa 'setiap orang' artinya dari setiap menurut penulis artinya siapapun dia berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa hak membentuk keluarga merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Lebih lanjut diatur secara khusus dalam Pasal 10 ayat (1) UU HAM yang menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan pemaknaan di atas, menegaskan bahwa ikatan perkawinan termasuk ke dalam terminologi 'setiap orang'. Terminologi setiap orang mencakup semua masyarakat termasuk juga pekerja maka dari itu perlindungan terhadap ikatan perkawinan pekerja menjadi sangat penting untuk dilindungi. Selain itu penafsiran tersebut juga disebutkan bawa makna dari 'kehendak bebas' adalah setiap orang bebas menentukan dengan siapa saja dia membentuk suatu keluarga tanpa membatasi tempat dan waktu.

Senada dengan hal tersebut, John Locke berpendapat bahwa manusia sejak lahir memiliki kebebasan penuh dan sempurna. Manusia bebas untuk bertindak oleh suatu apapun. Keadaan manusia adalah keadaan yang sepenuhnya bebas mengatur tindakan yang dianggap pantas bagi dirinya sendiri tanpa harus tergantung pada kehendak atau kemauan orang lain¹⁷. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa setiap oarang bebas untuk bertindak secara bebas dalam memilih pasangan hidup dimana hak tersebut adalah hak dasar dari setiap manusia. Oleh sebab itu ketentuan di dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan tidak mencerminkan kehendak bebas setiap orang dimana dengan Pasal tersebut pengusaha dapat membuat larangan bagi pekerja untuk tidak membuat ikatan perkawinan.

Semua manusia dilahirkan merdeka mempunyai mertabat dan hak-hak yang sama. Mengabaikan dan merendahkan HAM mengakibatkan tindakan kejam yang menimbulkan kemarahan dari dalam hati manusia.¹⁸ Marteson dari Komisi HAM PBB dapat disimpulkan dalam kalimat '*human right could be generally defined as those rights which are inherent in nature and without which we can not live as human being*'. Dengan demikian menurut Jan Martenson, HAM itu merupakan hak yang melekat pada sifat manusia yang tanpa hakekat tersebut, manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.¹⁹ Ikatan perkawinan sebagai bagian dari hak fundamental dari setiap orang maka sudah sepantasnya dilindungi bukan dibatasi seperti yang tertuang dalam Pasal 153 ayat 1 huruf f dimana dalam Pasal tersebut memberikan kewenangan penuh terhadap pengusaha agar dapat mengatur aturan yang

¹⁷ Basuki Ismail dalam Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (ed. 2, Mandar Maju 2014) 172.

¹⁸ Adnan B. Nasution, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia* (ed. 3, Obor Indonesia 2006) 135.

¹⁹ Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia* (ed. 3, Grafitti Budi Utami 2003) 2.

melarang membentuk ikatan perkawinan dengan teman sekantor melalui instrumen hukum yaitu perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Dari penjelasan tersebut maka DUHAM, UUD NRI 1945 dan UU HAM sudah sangat tegas melindungi hak setiap orang dalam membentuk ikatan perkawinan.

Pelanggaran HAM

HAM merupakan hak mutlak (*absolute*) yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau individu untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang harus menghormati hak tersebut. Dengan demikian HAM merupakan hak yang melekat (*inheren*) pada individu yang bersifat mutlak.²⁰ Hakekat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu. Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara.²¹ Pandangan di atas menunjukkan bahwa penghormatan terhadap hak dasar dari setiap manusia sangatlah penting. Oleh sebab itu, apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap HAM maka dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan luar biasa.

Pelanggaran HAM adalah pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional HAM. Lebih lanjut pengertian pelanggaran HAM diatur di dalam Pasal 1 ayat (6) UU HAM yang menyebutkan bahwa pelanggaran HAM adalah:

setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pasal 1 ayat 6 UU HAM menekankan bahwa yang menjadi subjek hukum perbuatan pelanggaran HAM yaitu setiap orang dan negara baik mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang. Dengan demikian pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Dari penjelasan di atas, apabila dikaitkan dengan Pasal 153 ayat 1 huruf f maka yang melakukan pelanggaran HAM adalah negara, dimana negara membuat suatu produk hukum yang dituangkan dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat 1 huruf f, memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk dapat melarang pekerjanya tidak menikah dengan teman sekantor. Selanjutnya pelanggaran HAM dilakukan oleh perusahaan dimana perusahaan dapat membuat larangan membuat ikatan perkawinan dengan teman sekantor melalui instrumen hukum yaitu perjanjian kerja,

²⁰ Bambang Heri Supriyanto, 'Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia' (2014) 2 (3) Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial 151, 155.

²¹ Susani Triwahyuningsih, 'Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia' (2018) 2 (2) Jurnal Hukum Legal Standing 113.

peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan Pasal 153 ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan.

Selanjutnya pelanggaran HAM dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok tetapi tidak mengancam keselamatan jiwa manusia. Tetapi pelanggaran ini bisa menjadi berbahaya jika tidak ditanggulangi secara langsung. Misalnya diskriminasi terhadap seseorang, pengerusakan terhadap sesuatu, dan lain-lain. Pelanggaran HAM berat yaitu tindakan yang dinilai berbahaya dan mengancam nyawa seseorang yang dilakukan oleh sekelompok manusia maupun pribadi individu. Bentuk pelanggaran HAM berat yaitu genosida, kejahatan atas kemanusiaan, kejahatan perang dan lainnya.²²

Merujuk pada penjelasan di atas, apabila dikaitkan dengan Pasal 153 ayat (1) huruf f maka ketentuan dalam Pasal tersebut termasuk pelanggaran HAM ringan yang dilakukan oleh negara, dimana negara memberikan kewenangan penuh kepada perusahaan untuk mengatur tentang larangan membentuk ikatan perkawinan pekerja melalui instrumen peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama. Seharusnya negara wajib melindungi serta menghormati hak pekerja dalam membentuk ikatan perkawinan. Kewajiban negara tersebut menjadi suatu hal yang harus, dikarenakan ikatan perkawinan adalah hak fundamental dari pekerja. Maka dari itu ketentuan dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f jelas adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara.

Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkan Putusan MK No. 13/PUU-XV/2017, yang dimohonkan oleh H. Jhoni Boetja dan kawan-kawan dengan alasan MK untuk membatalkan sebagian UU Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf f yang berbunyi 'kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama' karena bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa pembatasan sebagaimana termuat dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan tidak memenuhi syarat penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain karena tidak ada hak atau kebebasan orang lain yang terganggu oleh adanya pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dimaksud. Demikian pula tidak ada norma-norma moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis yang terganggu oleh adanya fakta bahwa pekerja/buruh dalam satu perusahaan memiliki pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan.

Hak pekerja

Hukum Ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara Pekerja/buruh dan pengusaha, yang berarti mengatur kepentingan orang perorangan. Hubungan kerja yang mengatur antara pekerja/buruh dan pengusaha pada dasarnya memuat hak dan kewajiban dari para pihak. Pengertian hak dan kewajiban selalu bersifat timbal balik antara satu dengan yang lain. Hak pekerja atau buruh merupakan

²² I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana Internasional* (Citra Aditya Bakti 2012) 164.

kewajiban bagi pengusaha, demikian pula sebaliknya hak pengusaha juga merupakan kewajiban pekerja/buruh.²³

Menurut Pasal 1 ayat 3 UU Ketenagakerjaan memuat pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Selain upah hak pekerja lain yaitu mendapatkan pekerjaan.

Pada sub bab ini, Penulis akan menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan hak memperoleh pekerjaan menurut hukum HAM. Pasal 23 DUHAM (1) *Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak atas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.* (2) *Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.* Dari muatan Pasal di atas tujuan dari setiap orang berhak atas pekerjaan yaitu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mampu mempertahankan hidup dengan mendapatkan upah dari hasil kerjanya.

Hal senada juga ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945. "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*" dan diperjelas lagi dalam muatan Pasal 38 UU HAM (1) *Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.* (2) *Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.* Dari muatan ketiga aturan hukum di atas terlihat jelas bahwa mendapatkan pekerjaan adalah bagian dari HAM. Namun dalam Pasal 38 UU HAM secara implisit memberikan syarat untuk mendapatkan pekerjaan yaitu sebagai berikut; *pertama*, setiap warga negara artinya bahwa negara memberikan prioritas sebanyak-banyaknya pada warga negara untuk memperoleh suatu pekerjaan. *Kedua*, *berbakat* artinya pekerja mempunyai keahlian khusus dalam bidang tertentu. *Ketiga*, *kecakapan* artinya calon pekerja haruslah cakap secara hukum, dimana cakap secara hukum yang dimaksud yaitu sudah dewasa, tidak berada di bawah pengampunan, dan sakit jiwa. Jika ketiga syarat ini telah terpenuhi maka secara hukum orang tersebut mempunyai hak memperoleh pekerjaan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Dari penjelasan di atas dapat dielaborasi dengan Pasal 153 ayat 1 huruf f maka Pasal tersebut tidak pro terhadap hukum dimana dengan adanya Pasal tersebut peluang untuk pekerja mendapatkan PHK sangat besar. Hal tersebut dikarenakan pekerja dan pemberi kerja telah bersepakat dalam perjanjian yang telah dibuat (perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama). Hal tersebut justru berlawanan arah dengan UU HAM sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya, dimana seseorang dapat dikatakan mempunyai hak untuk bekerja yaitu dengan syarat, warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan,

²³ Suhartoyo, 'Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional' (2019) 2 (2) Administrative Law & Governance Journal 326, 334.

jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka seseorang belum dapat dikatakan mempunyai hak untuk bekerja. Dari penjelasan di atas maksud penulis ialah, alasan PHK dapat dilakukan jikalau memenuhi syarat tersebut sehingga ikatan perkawinan bukanlah menjadi alasan yang tepat untuk PHK.

PHK dan Larangan PHK

Dalam Pasal 1 angka 25 UU Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan tersebut, maka dapat dipahami bahwa PHK merupakan opsi terakhir dalam penyelamatan sebuah perusahaan. UU Ketenagakerjaan sendiri mengatur bahwa perusahaan tidak boleh seenaknya saja memutus hubungan kerja karyawannya, terkecuali karyawan/pekerja yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran berat dan dinyatakan oleh pengadilan bahwa pekerja dimaksud telah melakukan kesalahan berat yang mana putusan pengadilan di maksud telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.²⁴

Ada 4 (empat) istilah dalam PHK, yaitu:

1. *Termination*, yaitu putusnya hubungan kerja karena selesainya atau berakhirnya kontrak kerja.
2. *Dismissal*, yaitu PHK karena tindakan indisipliner. Misalnya dalam hal tenaga kerja atau karyawan melakukan kesalahan-kesalahan seperti pemabok, madat, melakukan tindakan kejahatan dan sebagainya.
3. *Redundancy*, yaitu PHK yang dikaitkan dengan perkembangan teknologi. Misalnya suatu perusahaan yang menggunakan alat elektronik canggih seperti penggunaan robot-robot dalam proses produksi, yang mengakibatkan pengurangan pegawai atau karyawan.
4. *Retrenchment*, yaitu PHK yang dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi, seperti resesi ekonomi, masalah pemasaran dan lain sebagainya, sehingga perusahaan tersebut tidak dapat/tidak mampu memberikan upah kepada tenaga kerja atau karyawan.

Berdasarkan pengertian PHK di atas maka pasal 153 ayat 1 huruf f tidak termasuk ke dalam kategori PHK, karena PHK yang dimaksud dalam Pasal tersebut ialah dengan alasan ada hubungan ikatan perkawinan sesama pekerja. Maka PHK yang termuat dalam Pasal 153 ayat 1 huruf f tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Adapun Pasal yang mengatur tentang larangan pengusaha memutus hubungan kerja atas dasar HAM. Dalam Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan:

- a. *pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;*
- b. *pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

²⁴ Nikodemus Maringan, 'Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan' (2015) 3 (2) Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 3.

- c. *pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;*
- d. *pekerja/buruh menikah;*
- e. *pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;*
- f. *pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;*
- g. *pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;*
- h. *pekerja/buruh yang mengadakan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;*
- i. *karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;*
- j. *pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.*

Larangan PHK yang dimaksud dalam Pasal 153 ayat satu huruf a sampai huruf j itu semua berkaitan dengan hak-hak dasar manusia dimana hak tersebut adalah hak-hak fundamental manusia yang tidak bisa diganggu gugat oleh negara maupun perusahaan. Tetapi huruf f memberikan pengecualian yaitu perusahaan bisa mengatur larangan ikatan perkawinan melalui instrumen hukum (perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan peraturan kerja bersama) hal tersebut justru berbanding terbaik dengan yang telah di atur. Di satu sisi Pasal ini melarang, di sisi lain Pasal tersebut memperbolehkan. Menurut penulis hal tersebut tidak ada kepastian hukum yang jelas sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi para pekerja/buruh dimana hak dasar mereka dilanggar menggunakan instrumen undang-undang.

Adapun pengaturan lain yang mengatur mengenai larangan PHK, yaitu pada Pasal 2 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 2010 tentang Penyelesaian PHK dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian Di Perusahaan.

PHK dilarang:

- a. *pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan.*
- b. *pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- c. *pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya dan yang disetujui pemerintah.*
- d. *karena alasan menikah, hamil, melahirkan atau gugur kandungan.*
- e. *karena alasan pekerja wanita melaksanakan kewajiban menyusui bayinya yang telah diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama atau peraturan perundang-undangan.*
- f. *pekerja mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama.*

Dengan demikian apabila PHK yang dilakukan dengan alasan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 153 ayat 1 huruf f, maka PHK tersebut batal, demi hukum atau tidak dapat dibenarkan di mata hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.

PENUTUP

Berdasarkan analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan prinsip hak membentuk ikatan perkawinan karena perkawinan adalah hak kodrat manusia. Oleh karena itu, menjadikan sesuatu yang bersifat kodrat sebagai syarat untuk mengesampingkan pemenuhan HAM, dalam hal ini hak untuk membentuk ikatan perkawinan adalah tidak dapat dibenarkan dengan cara apapun.

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis hendak memberikan saran, frasa kecuali diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang termuat dalam Pasal 152 ayat 1 huruf f harus dihapuskan karena hal tersebut tidaklah memenuhi kepastian hukum yang jelas. Sebagai Negara Hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, maka sudah seyogyanya sebagai negara hukum menjamin hak-hak warga negaranya dengan menciptakan peraturan hukum yang dapat dipakai sebagai instrumen untuk memenuhi segala kebutuhan hukum serta menjamin perlindungan HAM.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang perkawinan No. 1/1974* (Dian Rakyat 1986).
- Fuady M, *Konsep Hukum Perdata* (cet. 2, Rajawali Pers 2006).
- Harahap K, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia* (ed. 3, Grafitri Budi Utami 2003).
- Ismail B dalam Nasution BJ, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (ed. 2, Mandar Maju 2014).
- Lili R, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Remaja Rosdakarya 1990).
- Marzuki PM, *Penelitian Hukum (edisi revisi)* (cet. 12, Prenadamedia Group 2005).
- Marzuki PM, *Penelitian Hukum* (Kencana 2005).
- Nasution AB, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia* (ed. 3, Obor Indonesia 2006).
- Prakoso D dan Murtika IK, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bina Aksara 1987).
- Prodjodikoro W, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (cet. 9, Sumur 1984).
- Suarda IGW, *Hukum Pidana Internasional* (Citra Aditya Bakti 2012).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Rineka Cipta 1991).

Jurnal

Purnomosidi A, 'Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Distabilitas di Indonesia' (2017) 1 (2) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.

Karim HM, 'Keabsaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila' (2017) 8 (2) ADIL jurnal hukum.

Supriyanto BH, 'Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia' (2014) 2 (3) Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial.

Triwahyuningsih S, 'Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia' (2018) 2 (2) Jurnal Hukum Legal Standing.

Suhartoyo, 'Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional' (2019) 2 (2) Administrative Law & Governance Journal.

Maringan N, 'Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan' (2015) 3 (2) Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.